

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Struktur birokrasi menjadi faktor yang mendukung implementasi RAN PE di BNPT. Dengan terbangunnya sistem birokrasi yang kuat dan komprehensif dapat menjadi dasar para implementor dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan ini secara efektif dan efisien.
2. Faktor penghambat implementasi RAN PE di BNPT antara lain seperti: Faktor Komunikasi yang mengakibatkan keterbatasan pengetahuan dan kompetensi terhadap tujuan pelaksanaan kebijakan yang ingin dicapai; Sumber Daya Manusia dan terbatasnya anggaran pelaksanaan RAN PE yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan RAN PE. Selain itu faktor Disposisi/Sikap menyebabkan berkurangnya motivasi dan kesediaan untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menjadi berkurang.
3. Strategi prioritas yang penting untuk dilakukan saat ini adalah
  - a. Melakukan optimalisasi komunikasi di lingkungan BNPT melalui Forum Diskusi Rutin RAN PE. Hal ini menjadi strategi yang sangat penting untuk dilakukan mengingat periode pelaksanaan RAN PE berakhir tahun 2024.
  - b. BNPT selaku penanggung jawab kebijakan ini untuk memasukan Aksi RAN PE dalam Sistem RKAKL BNPT dan melakukan koordinasi yang intensif dengan Bappenas terkait kebutuhan memasukan RAN PE dalam RPJMN 2025-2029.
  - c. Terkait perpanjangan RAN PE periode lanjutan 2025-2029 serta penguatan Tim Sekretariat Sekber RAN PE dan juga infrastruktur pendukung seperti penyiapan manajemen teknologi untuk mengoptimalkan pelaporan pelaksanaan RAN PE.

## B. Saran

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan menyeluruh tentang kompleksitas dan keberhasilan implementasi RAN PE di internal BNPT selaku K/L *leading sector* di dalam RAN PE itu sendiri.

1. Dalam konteks kebijakan, direkomendasikan agar BNPT terus meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk keberlanjutan RAN PE, hal ini juga termasuk merumuskan kebijakan lanjutan RAN PE dengan lebih mempertimbangkan berbagai evaluasi, hambatan, serta potensi yang ada dari implementasi RAN PE periode sebelumnya.
2. Penelitian ini juga menyarankan agar mampu memberikan masukan konstruktif kepada BNPT selaku institusi yang memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE hingga Tahun 2024 mendatang melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur lainnya.
3. Dalam konteks penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dampak jangka panjang kebijakan RAN PE di internal BNPT. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak kebijakan Perpres RAN PE di Masyarakat dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti K/L, OMS, serta masyarakat sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugraha, C., Budi Prasetyo, T., Kurniadi Prodi Peperangan Asimetris, A., & Strategi Pertahanan, F. 2022. "Penggunaan Kekuatan Batalyon Infanteri 315/Garuda Dalam Menanggulangi Kelompok Separatis Teroris Di Papua" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9, (6), 2141–2148. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2141-2148>
- Alkin, M. C., & King, J. A. 2017. "Definitions of evaluation use and misuse, evaluation influence, and factors affecting use". *American Journal of Evaluation*, 38(3), 434–450.
- Anderson, J. E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bahrul, J. 2021. "Implementasi Visi Sustainable Development Goals (SDGs) pada Program Berbasis Masyarakat di Era Pandemi". *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4, (1). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v4i1.711>
- Bardwell, H., & Iqbal, M. (2021). The Economic Impact of Terrorism from 2000 to 2018. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 27(2), 227–261. <https://doi.org/10.1515/PEPS-2020-0031/Machinereadablecitation/Ris>
- Berger, J. 2018. *Extremism*. Cambridge: The MIT Press.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: SAGE Publication.
- Dunn, W. N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwards, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. .1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H.. 2017. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan*

- Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- I-KHub BNPT. 2023. Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Jones, C. O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. California: Cole Pub Co.
- Knorr, K. D. 1977. "Producing and reproducing knowledge: Descriptive or constructive? Toward a model of research production". *Social Science Information*, 16(6), 669–696.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D.. 1980. "The Implementation of Public Policy : A Framework of Analysis". *Policy Studies Journal*, 8, (4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Nugraha, C. A., Kurniadi, A., & Prasetyo, T. B. 2022. "National Agency for Counter-Terrorism Strategy in Preventing The Threat of Violent Extremism to Support The National's Defense". *Edukasi IPS*, 06, (1), 12–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/EIPS.006.1.03>
- Nugroho, R. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Q.Patton, M. 2002. Qualitative research and evaluation methods. California: SAGE Publication.
- Rahardjo, M. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sekaran, U. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Selepe, M.M. 2021. "An Overview of Mechanisms of the Development of Public Policy for Good Governance". *African Journal of Development Studies* 11, (3). <https://doi.org/10.31920/2634-3649/2021/v11n3a10>
- Sjoraida, D. F. 2017. "Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi*, 5, (2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.442>
- Sunggono, B. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Tambunan, E. M. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun

- 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran. Y.A.P.
- Thwahirwa, A. 2018. Why public policy management remains a challenge in Africa. *The New Times* <https://www.newtimes.co.rw/opinions/why-public-policy-management-remains-challenge-africa>. Diakses pada 29 September 2023.
- Tim Peneliti Habibie Center. 2018. Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan : Aspek-Aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme. *Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada*, 2(November).1–28. Online. (<https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-4.pdf>). Diakses pada 12 Januari 2023.
- Tim Republika. 2018. Ledakan Bom Surabaya di Tiga Gereja. Republika. Online. (<https://www.republika.co.id/berita/p8n8j4430/ledakan-bom-surabaya-terjadi-di-tiga-gereja>). Diakses pada 12 Januari 2023.
- U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. 2016. 2016 Country Reports on Terrorism. U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. Online (<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-tentang-terorisme-2016/>). Diakses 12 Januari 2023.
- UNESCO. 2017. Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers. Online. (<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf>) Diakses pada 15 Januari 2023.
- United Nations Security Council. 2022. Thirtieth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning ISJL (Da'esh), AI-Qaida and associated individuals and entities.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. .1975. "The Policy Implementation Process".

Administration & Society, 6, (4), 445-488. .  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Wahid Foundation. 2017. Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. *Wahid Foundation*, 1–17.

Wardhani, Y. 2022. Hopes and Hurdles for Indonesia’s National Action Plan to Prevent Violent Extremism. Maret. <https://doi.org/10.37805/pn2022.2.sea>

Wulandari, D. D. 2019. “Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism”. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2, (1).  
<https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i1.1017>

Zulfikar, M., & Aminah, A.. 2020. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, (1), 129–144.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A